

Membedah Demokrasi di Era Jokowi: Analisis Corak Kekuasaan Pemimpin dan Partisipasi Rakyat sebagai Subjek Politik menurut Perspektif Michel Foucault

Emanuel Rizan Pryatno

¹ Mahasiswa Magister Teologi IFTK Ledalero

Email: ichanpryatno@gmail.com

Abstrak:

Diagnosis kejatuhan demokrasi di masa Jokowi, sudah lama dikemukakan dalam diskursus akademik. Banyak kajian menunjukkan bahwa di masa pemerintahannya, Jokowi menghancurkan prinsip-prinsip substantif demokrasi. Namun, mengapa Jokowi sulit dilengser? Apa yang memungkinkan Jokowi bertahan, walaupun ia sudah bertindak anti-politis dalam demokrasi? Berangkat dari hal ini, melalui artikel ini, penulis mengemukakan bahwa dimasa pemerintahannya Jokowi memiliki corak kekuasaan yang khas. Sebagaimana Michael Foucault, kekuasaan itu amat berhubungan dengan jaringan relasi dan pelbagai macam kekuatan yang saling mendukung. Demikian pula, corak kekuasaan Jokowi amat berhubungan dengan kekuatan yang beroperasi dalam jaringan relasi dengan pelbagai elemen dalam demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Melalui metode ini, penulis terlebih dahulu membaca dan mendalami pandangan Michael Foucault tentang kekuasaan. Lalu penulis membaca dan mendalami literatur yang berhubungan dengan rezim pemerintahan Jokowi. Sesudah itu, penulis mengkaji karakter kekuasaan Jokowi menurut perspektif Foucaultian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kekuasaan Jokowi tidak identik dengan kekerasan. Kekuasaan itu beroperasi secara tersembunyi. Ia sangat sulit dideteksi. Dalam ketersembunyian, corak kekuasaan Jokowi mampu merambah ke segala arah. Ia menembus tubuh subjek politik. Ia beroperasi dalam setiap institusi. Dalam jaringan relasi seperti ini, ia pun mampu menghimpun semua elemen. Ia mampu mengonstruksi kekuatan yang tangguh. Kekuatan seperti ini dianggap sebagai modal yang memungkinkan Jokowi tetap teguh dan bertahan dalam demokrasi.

Kata kunci: kekuasaan, Jokowi, pendisiplinan, subjek, elemen.

Pendahuluan

Alarm kehancuran demokrasi di tangan Jokowi sesungguhnya telah lama berkumandang. Tom Power, peneliti Australia, bahkan sudah lama menegaskan bahwa sejak menjadi presiden pada periode pertama, Jokowi telah melukai demokrasi. Bagi Power, keadaan semacam ini terjadi beriringan dengan

legitimasi Islam politik yang konservatif dan anti-pluralistik, instrumentalisasi lembaga-lembaga penting negara; ‘penjinakan’ sikap aktivis, dan pemberdayaan oposisi.¹

Selain Tom Power, beberapa ilmuwan sosial-politik juga mengutarakan hal yang sama. Mereka mengemukakan bahwa di masa Jokowi, demokrasi mengalami ‘peralihan’: dari stagnasi menjadi regresi. Tanda-tanda kemunduran ini didukung dengan penyalahgunaan hukum untuk tujuan politik (*law-fare*), penjegalan sikap kritis dan kebebasan berpikir, menguatnya keterlibatan militer dalam politik, penyelesaian masalah kemanusiaan yang belum tuntas, dan lemahnya sistem *check and balance*.²

Karena itu, di masa Jokowi demokrasi mengalami distorsi hebat. Walaupun diklaim sebagai ‘anak kandung reformasi’, Jokowi justru berhasil memberangus prinsip-prinsip demokrasi. Ia mengeliminasi kepentingan kolektif. Ia berhasil melenyapkan unsur-unsur politik substantif. Namun, berhadapan dengan kenyataan ini, mengapa Jokowi masih tetap ‘eksis’ dalam tatanan politik? Mengapa Jokowi masih mampu mempertahankan posisinya, padahal *de facto* ia sudah melakukan pembangkangan politik? Apa yang memungkinkan Jokowi lekas kokoh ‘berdiri’, padahal seturut kajian akademik, ia sudah mencederai demokrasi?

Terhadap hal ini, beberapa peneliti telah mengemukakan kajiannya. Dalam artikelnya berjudul “Strategi Pemimpin Populis Baru Indonesia Mencapai Kekuasaan” (2015), Imelda Masni Juniaty Sianipar, misalnya, menegaskan bahwa kekuatan Jokowi terletak dalam corak kepemimpinannya yang populis. Menurutnya, di masa kepemimpinannya, Jokowi berhasil membangun kekuatan dengan mengandalkan pengalaman organisasi, *skill, leadership* dan prestasi, serta kedekatan dengan masyarakat.³

Sementara itu, dalam artikelnya berjudul “Komunikasi Politik Jokowi Melalui Diplomasi di Meja Makan” (2020), Rusmawaty Bte. Rusdin mengemukakan bahwa kekuatan Jokowi terletak pada model komunikasi meja makan. Menurutnya, corak komunikasi ini sangat unik. Sebab, dalam model komunikasi seperti ini, Jokowi langsung meninjau lokasi dan berbicara dari hati ke hati dengan warga. Hal semacam ini, bagi Rusdin, membuat warga memberi dukungan penuh kepada Jokowi.⁴

Menurut penulis, dua artikel ini amat menekankan gaya kepemimpinan dan model komunikasi Jokowi. Dalam dua artikel ini, Sianipar dan Rusdin, masing-masing mengemukakan bahwa Jokowi mampu bertahan dalam demokrasi karena ia memiliki karakter kepemimpinan populis dan cara berkomunikasi yang merakyat. Dengan pola semacam ini, bagi kedua penulis, Jokowi mampu memantapkan kekuatan dengan mencuri simpati rakyat.

¹Thomas P. Power, “Jokowi’s Authoritarian and Indonesia’s Democratic Decline”, *Bulletin of Indonesian of Economic Studies*, 54:3 (New York:Routledge, 2018), hlm. 308.

² Kajian para ilmuwan sosial-politik ini dapat dibaca dalam Thomas Power dan Eve Warburton (ed.), *Demokrasi di Indonesia: dari Stagnasi Menuju Regresi*, terj. Yusof Ishak Institute (Jakarta: KPG, 2020) dan Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, dan Herlambang P Wiratraman (ed.), *Demokrasi Tanpa Demos* (Depok: LP3ES, 2021).

³ Imelda Masni Juniaty Sianipar, “Strategi Pemimpin Populis Baru Indonesia Mencapai Kekuasaan”, *Jurnal Sociae Polites* 01:16 (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia, 2015), hlm. 17.

⁴ Rusmawaty, Bte. Rusdin, “Komunikasi Politik Jokowi Melalui Diplomasi di Meja Makan”, *Jurnal Kinesik* 2:7 (Palu: Universitas Tadulako, 2020), hlm 133.

Berbeda dengan Sianipar dan Rusdin, menurut penulis, salah satu hal yang membuat Jokowi bertahan dalam demokrasi adalah karena ia memiliki karakter kekuasaan yang unik. Kekuasaan itu beroperasi secara terselubung. Ia tersembunyi. Ia sangat sulit dideteksi. Dalam ketersembunyian, corak kekuasaan Jokowi mampu merambah ke segala arah. Ia mampu menembus tubuh subjek. Ia lekas beroperasi dalam setiap institusi. Karena itu, tidaklah heran ‘mengapa ia teguh bertahan’. Sebab corak kekuasaan Jokowi, khas dan kuat.

Karena itu, dalam artikel ini, penulis hendak membedah karakter dan mekanisme kekuasaan Jokowi. Berbeda dengan Sianipar dan Rusdin yang cenderung menekankan aspek kepemimpinan dan gaya komunikasi, melalui kajian ini, dengan menggunakan pisau analisis Foucaultian, penulis hendak membuktikan bahwa corak kekuasaan Jokowi turut memantapkan posisinya sebagai Presiden. Walaupun dinilai sebagai pemimpin neo-otoritarianik, namun karakter kekuasaan itu justru membuat Jokowi sulit untuk dilengser dalam tatanan politik demokratis .

Kekuasaan Menurut Michel Foucault dan Rezim Politik Jokowi

Watak Kekuasaan

Michel Foucault menerangkan pengertian kekuasaan dalam bukunya *History of Sexuality: vol. 1 The Will to Knowledge*. Dalam karya ini, ia menegaskan bahwa kekuasaan yang dimaksud bukan mengarah kepada ‘Kekuasaan’ sebagai himpunan lembaga dan perangkat yang menjamin kepatuhan warga negara di dalam suatu negara tertentu. Ia juga tidak mengartikan kekuasaan sebagai suatu sistem dominasi total suatu unsur. Selain itu, ia juga tidak mendefinisikan kekuasaan itu sebagai cara penundukan yang berbentuk kekerasan.⁵

Namun, menurutnya, kekuasaan identik dengan pelbagai macam hubungan kekuatan yang *inherent* di dalam tubuh hubungan itu berlaku. Kekuasaan itu mesti dimengerti sebagai kekuatan yang menyatu dalam unsur pembentuk dan rantai organisasionalnya. Kekuasaan itu pun mesti dipahami dalam ranah perjuangan dan permainan tanpa henti: tentang upaya untuk mengubah dan memperkokoh posisi. Selain itu, kekuasaan itu juga mesti dikaitkan dengan berbagai hubungan kekuatan yang saling mendukung dan membentuk rangkaian atau sistem.⁶

Untuk itulah, menurut Foucault, kekuasaan itu bukan tentang represi dan dominasi entitas kelas, golongan, atau kelompok, atau juga bukan tentang pemaksaan keinginan pelaku kekuasaan kepada objek yang lain. Namun menurut Foucault, kekuasaan itu menyangkut suatu situasi yang berurusan dengan strategi, teknik, atau mekanisme yang rumit dalam masyarakat tertentu.⁷ Ia tidak bisa dilokalisasi. Ia tidak bisa digenggam dengan satu tangan. Ia mesti didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebar: sesuatu yang

⁵Michel Foucault, *The History of Sexuality: Volume I An Introduction*, terj. Robert Hurley (New York: Pantheon, Books, 1978), hlm. 92.

⁶*Ibid.*, hlm. 93.

⁷*Ibid.*, hlm. 94.

inheren di dalam bentuk rangkaian. Dengan itu, ia baru berfungsi dalam satu jaringan hubungan organisasional.⁸

Dengan bertolak dari hal ini, Foucault mengelaborasi beberapa konklusi tentang kekuasaan.⁹ *Pertama*, kekuasaan itu bukan sesuatu yang diperoleh atau digenggam. Sebaliknya kekuasaan berfungsi berdasarkan unsur tak terhitung jumlahnya dalam permainan hubungan yang tak sederajat. *Kedua*, hubungan kekuasaan itu tidak berada di luar entitas kekuasaan. Hubungan itu justru imanen di dalamnya. Di dalam hubungan itu, masing-masing bagian memiliki peran ‘produktif’ (penghasil) secara langsung’. *Ketiga*, hubungan kekuasaan itu tidaklah bersifat subjektif: berdasarkan hasil dari pilihan atau keputusan orang secara individual. Hubungan kekuasaan itu berada dalam skema rasionalitas kekuasaan yakni menyangkut taktik yang saling mengkait, membantu, dan mendukung dalam penyebaran satu sama lain. *Keempat*, di mana ada kekuasaan, di situ pasti ada perlawanan. Perlawanan itu adalah sisi lain dari hubungan kekuasaan. Di sini, ia memainkan ‘arus balik’: melawan dan membuka peluang untuk menguasai.

Teknik Pendisiplinan dan Diseminasi Pengetahuan

Lantas, dengan berpijak pada pengertian ini, bagaimana teknik/cara kerja kekuasaan? Menurut Foucault kekuasaan itu mampu menerapkan mekanismenya sebab ia terkondisi di dalam teknik atau pengoperasian yang sedemikian canggih. Hal ini pun diperlihatkan Foucault dalam karyanya *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Dalam karya itu ia menjelaskan bahwa sebelum memasuki era-modern, terutama semasa abad pertengahan, teknik kekuasaan atas tubuh dikanalisis di dalam proses hukum yang represif. Di dalam hukum seperti ini, hasrat para kriminal dibendung. Mereka diawasi, diarahkan, dan bahkan dipaksa untuk hidup selaras hukum.¹⁰

Namun demikian, di akhir abad ke-17 muncul suatu fenomena baru. Menurutnya, sejak masa itu, teknik kekuasaan atas tubuh individu tidak lagi bercorak represif layaknya dalam tatanan monarki, namun teknik kekuasaan itu terjalin di dalam kuasa disiplin. Disiplin, menurutnya, adalah modal kuasa yang dominan. Ia berkuasa atas tubuh dan menuntun individu untuk patuh. Ia membentuk tingkah laku. Ia mengarahkan tindakan pelaku ke dalam relasi imanen kekuasaan.¹¹

Lantas seperti apa teknik pendisiplinan ini bekerja? Menurut Foucault, teknik pendisiplinan ini dimulai dengan menempatkan seni distribusi (*the art of distribution*). Seni distribusi memungkinkan semua tubuh heterogen bersatu dalam kawasan yang sama. Hal seperti ini bisa terlihat di dalam lingkup

⁸Michel Foucault, “Power, Right, Truth”, dalam *Contemporer Political Philosoph*, Robert E. Goddin dan Philip Pettit (ed.) (Victoria: Blackwell Publishing Ltd, 1997), hlm. 545-546.

⁹Michel Foucault, *The History of Sexuality: Volume I An Introduction*, *op. cit.*, hlm. 95-96.

¹⁰Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, terj. Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995), hlm. 14.

¹¹*Ibid.*, hlm. 136-137.

tentara, sekolah, dan kolega lainnya. Dalam kelompok seperti ini, semua jenis tubuh ditempatkan dalam lingkup yang sama. Semuanya hidup dalam lanskap yang sama.¹²

Menurut Michel Foucault, dalam situasi semacam ini terjadi kontrol aktivitas. Di dalam proses ini, terjadi upaya pengawasan terus menerus. Setiap pribadi dituntut sedemikian rupa. Setiap pribadi dibentuk seturut tuntutan kekuasaan.

Sebagaimana ditegaskan Josep Rouse, selain melalui teknik pendisiplinan, Foucault juga menyadari transformasi penting praktik kekuasaan. Menurutnya, kontinuitas praktik kekuasaan itu juga dimungkinkan dengan pemantapan formasi pengetahuan. Dalam kondisi ini, pengetahuan diproduksi dan disebar sedemikian rupa demi memantapkan kekuasaan.¹³ Namun demikian, Foucault juga menyadari bahwa di dalam praktik kekuasaan itu, setiap komponen juga memproduksi jenis-jenis pengetahuan tentang objek yang dikehendaki. Maka dalam masyarakat modern, menurut Foucault, praktik kekuasaan juga dimungkinkan dengan penyebaran pengetahuan. Demikian pula, sederet pengetahuan modern (kegilaan, seksualitas, dan lain-lain) dimungkinkan dengan adanya praktik kekuasaan.¹⁴

Lantas, bagaimana hal ini bisa diselidiki? Sebagaimana ditegaskan Josep Rouse, Foucault sesungguhnya menyelidiki hubungan korelatif antara kekuasaan dan pengetahuan ini di dalam kerangka praktik politik-epistemik. *Pertama*, dia menyadari bahwa di satu sisi terjadi penyebaran pengetahuan secara sistematis atas individu. Penyebaran pengetahuan ini berhubungan dengan praktik pengawasan, pendisiplinan, dan pengontrolan. Dalam hal ini, pengetahuan disebarkan untuk tujuan peningkatan bakat, kemampuan, atau kapasitas individualnya. *Kedua*, dengan dibentuk dan disebarkan pengetahuan individual seperti ini, Foucault menyadari jikalau individu-individu tersebut kemudian terseret ke dalam lingkaran kuasa (ekonomi-politik). Di dalam lingkaran kuasa ekonomi politik, mereka dibayangkan sebagai populasi yang berdaya dan memiliki kapasitas dalam bekerja. Mereka dituntut untuk produktif. Mereka beroperasi dengan turut menyebarkan pengetahuan demi memantapkan kebenaran kekuasaan.¹⁵

Paradoks Kekuasaan Jokowi: Suatu Desakan Pembacaan Perspektif Kekuasaan Foucaultian?

Mengapa perlu membaca Jokowi dari perspektif Kekuasaan Foucaultian? Pertanyaan ini menghantar penulis pada refleksi keterpilihan Jokowi sebagai presiden dalam kontestasi elektoral pada 2014. Kala itu Jokowi tampil sebagai orang baru. Ia bukan lahir dari golongan kelas elit. Ia hanyalah rakyat biasa: dari kalangan kelas bawah.¹⁶

¹²*Ibid.*, hlm. 141.

¹³Josep Rouse, "Power/Knowledge", dalam *The Cambridge Companion of Foucault*, Garry Gunting (ed.) (Cambridge: The Press Syndicate of The University of Cambridge, 1994), hlm. 94.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 97.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 98.

¹⁶Markus Mitzler, *Reinventing Asia Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia* (Hawai'i: East-West Center, 2015), hlm. 1.

Namun, di tengah keadaan seperti ini, Jokowi tidak ‘hilang akal’. Walaupun tidak memiliki modal politik yang mumpuni, Jokowi justru memainkan karakter politik populis. Dalam karakter politik seperti ini, ia mewacanakan posisinya sebagai bagian dari golongan rakyat. Ia menonjolkan identitas sebagai bagian dari kalangan kelas bawah. Ia selalu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari *wong cilik* (rakyat kecil).¹⁷

Taktik politik ini pun diperkuat tatkala Jokowi mengedepankan gerakan blusukan. Ia selalu mengunjungi rakyat kecil di jalan, di pasar, di area persawahan, di tempat-tempat kumuh, dan lain sebagainya. Ia gemar tampil sederhana dengan mode pakaian yang mengesankan. Ia tampil dengan senyum ramah, dengan citra politik yang menyentuh hati rakyat.

Alhasil, dengan modal politik inilah, Jokowi berhasil menyentuh rakyat. Walaupun tidak memiliki kekuasaan ideologis ataupun religius, berkat kecakapannya, Jokowi berhasil menghimpun kekuatan. Ia mampu menghimpun dukungan dari partai dan berhasil menarik simpati rakyat. Dengan kekuatan inilah, Jokowi menjadi pemenang dalam kontestasi elektoral.

Kala itu, kemenangan Jokowi dianggap sebagai kemenangan rakyat. Sebab diyakini bahwa keterpilihan Jokowi lahir dari kehendak para *voters* untuk memilih pemimpin yang merakyat. Di tengah keadaan demokrasi yang belum membaik, masyarakat pun memilih Jokowi, sebab ia adalah figur populis, yang mampu menjadi representasi kepentingan rakyat.

Namun, tatkala menjabat sebagai presiden, Jokowi justru menunjukkan sisi paradoksal. Pasalnya, di tengah harapan untuk menjadi pembawa kebajikan, ia justru mereduksi demokrasi. Banyak kajian menunjukkan bahwa di masa kekuasaannya, Jokowi mencederai prinsip-prinsip politik. Ia kerap menyalagunakan wewenang dengan menginstrumentalisasi birokrasi, agama, hukum, militer dan pelbagai komponen penting dalam demokrasi. Terkini, tindakan anti-demokratis Jokowi terbukti tatkala MK mengabulkan salah satu gugatan tentang batasan umur calon wakil Presiden. Sikap MK dinilai tidak demokratis, sebab keputusan itu ‘di-*setting*’ secara politis demi memungkinkan Jokowi mengorbitkan anak kandung sebagai wakil Presiden.¹⁸

Karena itu, dalam laporan “*Democracy Index 2023: Age of Conflict*”, yang dirilis *Economist Intelligence Unit* (EIU), pada tahun 2023 indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat ke-56 dengan skor 6,53, turun dua tingkat dari tahun 2022 dengan skor 6,71.¹⁹ Data ini menjadi bukti bahwa di masa Jokowi demokrasi Indonesia mengalami cacat. Demikian pun, selama ia menjabat, demokrasi berada keadaan darurat.

Karena itu, inilah gambaran tentang Jokowi. Ia adalah figur yang paradoksal. Alih-alih dianggap merakyat, Jokowi justru mencederai kepentingan bersama. Walaupun dianggap sebagai figur populis, ia justru menjauh dari kepentingan umum.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 25

¹⁸Ican Pryatno, “Titik Nadir Demokrasi”, *Pos Kupang*, edisi 24 Agustus 2024.

¹⁹<https://dataindonesia.id-indeks-demokrasi-di-indonesia>, diakses pada 18 Oktober 2024.

Namun demikian, di balik sisi paradoksalnya, Jokowi justru menyimpan kekuatan tersembunyi. Menurut Made Supriatma, Jokowi memiliki kepandaian dalam melakukan *politicking*. *Politicking* merujuk pada suatu tindakan dengan terlibat dalam urusan politik untuk mempengaruhi keputusan dan merawat hubungan. Hal ini terlihat tatkala ia berhasil menghimpun sebagian besar partai untuk mendukung pemerintah. Usaha seperti ini dianggap penting, sebab itu adalah medium untuk menjamin dukungan penuh terhadap pemerintah.²⁰

Karena itu, menurut penulis, di tengah situasi paradoksal kekuasaan Jokowi, penting untuk dibuat kajian seturut perspektif kekuasaan Michael Foucault. Hal ini dibuat karena alasan berikut: *pertama*, selama menjabat sebagai presiden, Jokowi sudah mencederai demokrasi. Namun di tengah kenyataan seperti ini, publik kurang tanggap terhadap keadaan. Walaupun Jokowi secara terbuka menunjukkan sisi paradoksal kekuasaan, masyarakat enggan memberikan perlawanan. Lalu, apakah itu terjadi lantaran semata-mata karena masyarakat masih terjebak dengan kesan lama bahwa Jokowi adalah figur yang merakyat?

Menurut penulis, hal ini tidak semata-mata dibaca dari perspektif kepemimpinan populis Jokowi. Sebab cara pandang ini hanya sekadar berkutat pada teknik kepemimpinan Jokowi sebagai figur yang mampu meraup keuntungan dengan merebut hati rakyat. Bagi penulis, dengan berpijak pada analisis Foucaultian, dapat dibaca bagaimana di masa kepemimpinannya Jokowi tidak sekadar tampil merakyat, namun ia juga memberdayakan rakyat. Corak politik yang dimainkan mengandung unsur kekuasaan, sebab ia mampu menghadirkan subjek yang patuh dan produktif.

Kedua, sebagaimana dikemukakan Made Supriatma, di masa kepemimpinannya, Jokowi berhasil melakukan *politicking* dengan menghimpun pelbagai macam kekuatan. Ini adalah kekuatan tersembunyi, yang hidup di balik sisi paradoksalnya. Namun, sebetulnya Jokowi tidak semata-mata melakukan *politicking*. Di balik upaya merawat hubungan, terkandung corak kekuasaan untuk mengontrol dan memberdayakan setiap komponen. Dengan menggunakan analisis Foucaultian, dalam mekanisme pemberdayaan seperti ini, terkandung upaya teknik kekuasaan dan diseminasi pengetahuan. Semua itu dirangkai dalam suatu hubungan demi menjamin keberlangsungan kekuasaan.

Kekuasaan Jokowi dan Formasi Pengetahuan

Soeharto vs Jokowi: Dua Corak Kekuasaan yang Berbeda!

“Apakah demokrasi kita dalam bahaya?” Demikianlah Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menulis pertanyaan pembuka dalam karya mereka berjudul “*How Democracies Die*”. Pertanyaan ini sengaja dikemukakan, sebab menurut kedua ilmuwan politik ini, demokrasi saat ini mati dengan cara yang unik. Apabila di masa perang dingin, demokrasi mati di tangan-tangan orang bersenjata, sekarang

²⁰Made Supriatma, “Langkah Politik Jokowi: dari Populis ke Oportunis”, dalam <https://projectmultatuli.org/langkah-politik-jokowi-dari-populis-ke-oportunis>, diakses pada 18 Oktober 2024.

demokrasi justru mati di tangan pemimpin yang memiliki kekuasaan legitim. Dengan demikian, apabila dulu di beberapa negara, demokrasi mati di tangan jenderal, sekarang ia justru mati di genggaman kekuasaan presiden ataupun perdana menteri terpilih.²¹

Di Indonesia, seruan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt tentu relevan. Di masa Orde Baru, setelah menjabat sebagai presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto membredel demokrasi dengan corak kekuasaan otoriter. Demi menjamin stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan keamanan nasional, Soeharto memimpin dengan pendekatan represif dan militeristik. Dengan memberlakukan sistem dwifungsi ABRI, ia membuka peluang bagi anggota kelompok militer untuk menjadi ‘kaki tangannya’ dalam politik. Selain itu, ia melakukan propaganda, mengontrol organisasi partai politik, membredel media, dan bahkan merepresi sikap kritis.²²

Ini adalah corak kepemimpinan Soeharto. Dengan corak kekuasaan tangan besi, ia berhasil mengamankan kepemimpinannya. Pun dengan warna kekuasaan yang sentralistik-represif, Soeharto mampu mempertahankan kepemimpinan selama 32 tahun.

Tidak seperti Soeharto, di masa Jokowi, corak kekuasaan itu justru khas. Ia tidak sekadar mengedepankan represi kekuasaan yang kentara. Ia juga tidak semata-mata memainkan taktik politik otoriter yang terbuka. Jauh melampaui itu, dalam kesan politik yang ramah dan merakyat, Jokowi justru memainkan corak kekuasaan yang halus dan tersembunyi. Kekuasaan itu tidak identik dengan kekerasan. Pun kekuasaan itu bukan sekadar penundukan yang sadistik. Namun, kekuasaan Jokowi justru mengarah kepada pelbagai macam hubungan kekuatan yang inheren di dalam tubuh hubungan itu berlaku. Kekuasaan itu berhubungan dengan unsur-unsur pembentuk dalam rantai organisasionalnya. Ia berhubungan dengan berbagai macam kekuatan yang saling mendukung dan membentuk rangkaian atau sistem.²³

Karena itu, menurut perspektif Foucaultian, kekuasaan Jokowi menyebar dalam rantai jaringan dengan semua pihak. Ia identik dengan kekuatan yang membawa pengaruh kepada semua elemen dalam rangkaian relasi.²⁴ Kekuatan itu beroperasi dalam relawan politik, komponen pendukung, partai, kelompok koalisi, organisasi keagamaan, lembaga negara, dan pelbagai komponen penting dalam demokrasi yang mendukung Jokowi. Semua elemen ini saling terhubung. Mereka saling terikat satu sama lain.²⁵

²¹ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (United States: Crown, 2018), hlm. ix

²² Yusa’ Farchan, “Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru”, *Jurnal Adhikari* 1:03 (Bogor:Citra Institute, 2022), hlm. 156.

²³ Michel Foucault, *The History of Sexuality: Volume I An Introduction*, *op.cit.*, hlm. 93.

²⁴ Bertrand Russell, *Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial dan Politik*, terj. Hasan Basari (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 1988), hlm. 29.

²⁵ Michael Foucault, “Power, Right, Truth”, dalam *Contemporary Political Philosophers*, Robert E. Goddin dan Philip Pettit (ed.), *op.cit.*, hlm. 545-546.

Namun demikian, setiap elemen yang terikat dalam jaringan kekuasaan Jokowi, dituntut untuk produktif.²⁶ Setiap perangkat kekuasaan, baik subjek ataupun institusi, beroperasi untuk mendiseminasi kepentingan Jokowi. Mereka bekerja untuk mempertahankan kekuatan dan hal-hal baik yang dibangun Jokowi. Karena itu, dalam konteks ini, kekuasaan dalam tubuh Jokowi adalah kekuasaan yang relasional-produktif. Ia tidak sekadar menghimpun elemen untuk pasif dan diam di hadapan kekuasaannya, tetapi juga mendorong mereka, dalam jaringan relasi, untuk aktif bekerja menggolkan kepentingan-kepentingan terselubungnya.

Jelas ini berbeda jauh dengan corak kekuasaan represif ala Soeharto. Semasa Orde Baru, Soeharto sekadar membentuk komponen manusia massal, yang sekadar tunduk, namun tidak ‘produktif’. Orang-orang ini diawasi, dipantau sedemikian rupa. Demi menjamin pembangunan dan stabilitas politik, masyarakat direduksi sebagai manusia ‘massa’ yang sekadar mengikuti kehendak pemerintah.²⁷ Namun di masa Jokowi, komponen-komponen kekuasaan juga turut bekerja. Mereka turut beroperasi untuk melegitimasi kekuasaan Jokowi.

Karena itu, di balik citra politik populistik dan kesan-kesan yang menyentuh, Jokowi berhasil menjadikan seluruh komponennya sebagai ‘penguasa’ dengan mempengaruhi pihak lain. Dengan kehendak dan pengetahuan yang dimiliki, mereka berupaya memperlebar ‘sayap’ kepentingan. Mereka digandrungi hasrat untuk melegitimasi kekuasaan. Mereka bertindak ekstra untuk memproduksi kebenaran di ranah publik tentang kedaulatan Jokowi. Hal ini paling tampak tatkala di masa kepemimpinannya, kekuasaan Jokowi berhasil menghimpun *buzzer* di media sosial.²⁸ Mereka adalah kumpulan orang-orang yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang kekuasaan. Mereka berusaha untuk mempengaruhi opini publik dengan memproduksi citra positif tentang Jokowi. Bahkan gawatnya, demi mengamankan takhta Jokowi, mereka juga mendengungkan kebohongan dan kampanye hitam tentang lawan. Persis di sinilah kelompok *buzzer* terlibat sebagai bagian dari perangkat kekuasaan. Dengan kapasitas yang dimiliki, mereka bekerja untuk melebarkan sayap kepentingan Jokowi.

Teknik Pendisiplinan Kekuasaan Jokowi

Bagaimana cara kerja kekuasaan Jokowi? Bagaimana Jokowi menghimpun kekuatan yang tangguh? Apa yang memungkinkan kekuasaan Jokowi mampu mengaktifkan subjek politik dan elemen-elemen penting dalam demokrasi? Menurut penulis, semua ini terjadi karena kekuasaan Jokowi memiliki teknik pengoperasian yang canggih. Tidak seperti Soeharto yang menerapkan kekerasan dan hukum yang represif,²⁹ teknik kekuasaan Jokowi terjalin dalam kuasa disiplin. Di sini, Jokowi mengarahkan individu

²⁶Michael Foucault, *The History of Sexuality: Volume I An Introduction*, *op. cit.*, hlm. 95-96.

²⁷Yusa’ Farchan, “Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru”, *op.cit.*, hlm. 159.

²⁸“Rusak Demokrasi Karena Ulah Pendengung”, dalam <https://majalah.tempo.com/amp/opini/164521/bagaimana-buzzer-pemerintah-berkomplot-menghancurkan-demokrasi>, diakses pada 16 Oktober 2024.

²⁹Michael Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, *op.cit.*, hlm. 14.

untuk patuh. Ia membentuk tingkah laku. Ia mengarahkan setiap komponen untuk menyatu dalam relasi imanen kekuasaan.³⁰

Lantas seperti apa teknik pendisiplinan ini bekerja? Mula-mula teknik pendisiplinan ini beroperasi tatkala Jokowi menghimpun individu dalam jaringan kekuasaan. Ia memperkuat posisi dengan menggaet kawan pendukung. Dalam rekam jejak politiknya, hal ini dimulai Jokowi tatkala ia menjabat sebagai wali kota Solo. Kala itu, ia tampil sebagai pemimpin dari golongan rakyat. Ia memang tidak lahir dari kalangan elit. Sebab ia hanyalah rakyat biasa: seorang pengusaha *furniture* (mebel). Namun, popularitas Jokowi di tengah rakyat maupun kelompok elit partai kian mencuat tatkala ia berhasil menata Kota Solo menjadi kian berkembang. Saat menjabat sebagai pemimpin pun, ia bahkan berhasil mempopulerkan kota Surakarta (Solo) di tingkat internasional, hingga kota tersebut berhasil menjadi tuan rumah Konferensi Organisasi Kota-Kota Warisan Dunia pada Oktober 2008. Karena dinilai mendatangkan kemajuan, ia pun mulai diperhitungkan. Secara perlahan, ia mulai menghimpun kekuatan.³¹

Tidak hanya berhenti di sini. Jokowi semakin menghimpun kekuatan tatkala PDI-P turut mendorong ia untuk menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih dalam kontestasi di daerah tersebut, Jokowi menunjukkan pelbagai prestasi, di antaranya dengan merelokasi warga di Waduk Ria Rio Pulogadung, Jakarta Timur, ke Rumah Susun Seswa Pinus Elok. Ia juga membangun Angkutan Massal Cepat (MRT) dan mengadakan seribu bus untuk jalur bis Transjakarta. Selain itu, ia juga meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Karena program-program ini dinilai membawa kemajuan, maka popularitas Jokowi pun semakin melejit. Prestasi demi prestasi dibuatnya, hingga beberapa partai dan sebagian besar pendukung Jokowi, mengusung dirinya menjadi presiden.³²

Dalam pencalonan presiden di lingkup PDI-P, Jokowi mengalahkan dukungan terhadap Megawati Soekarno Putri. Ia berhasil memikat kepercayaan partai dan berhasil menghimpun kekuatan pendukung yang kuat. Ia pun terpilih menjadi presiden. Tidak hanya itu. Dengan kebijakannya yang dinilai populis, Jokowi berhasil membangun koalisi gemuk yang kuat dan mengkokohkan kelompok relawan pendukungnya.³³ Selain itu, ia juga menghimpun kekuatan militer, birokrasi, institusi keagamaan, dan semua komponen penting dalam demokrasi.

Inilah cara kerja awal bagaimana kekuasaan Jokowi tersebar. Mula-mula ia mengakomodasi semua kekuatan; menyeret mereka dalam jaringan kekuasaan. Dengan mekanisme yang halus, ia menghimpun semua pihak ke dalam satu tatanan. Dalam proses ini, terjadi upaya pengawasan terus

³⁰*Ibid.*, hlm. 136-137.

³¹Imelda Masni Juniaty Sianipar, "Strategi Pemimpin Populis Baru Indonesia Mencapai Kekuasaan", *op.cit.*, hlm. 19.

³²*Ibid.*, hlm. 20.

³³Istilah koalisi gemuk dipahami sebagai sebuah model koalisi tatkala mayoritas partai di parlemen merupakan pendukung pemerintah. Di masa Jokowi, beberapa partai besar yang berkoalisi dengan pemerintah, yakni PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP, PSI, dan Perindo. Selain, demi memantapkan koalisinya, Jokowi juga merangkul rival politiknya, yakni Prabowo. *Ibid.*, hlm. 28.

menerus. Setiap pihak didisiplinkan. Demikian, pikiran dan tindakan mereka dibentuk seturut tuntutan kekuasaan.³⁴ Karena itu, seluruh aktivitas mereka berada di bawah kendali kuasa yang hegemonik. Mereka menjadi ladang artikulasi. Mereka menjadi objek kekuasaan.³⁵

Dalam jaringan kekuasaan ini, semua elemen yang didisiplinkan bekerja seturut rasionalitas kekuasaan. Di sini mereka memberlakukan taktik yang saling menghubungkan kepentingan satu sama lain. Mereka saling ‘mengkait’ dan mendukung demi menjamin keberlangsungan relasi kekuasaan Jokowi. Apabila ada yang membangkang, maka ia segera dieliminasi.

Persis hal ini diperlihatkan Jokowi tatkala ia membubarkan organisasi Front Pembela Islam. Sampai dengan era kepemimpinan Jokowi, kelompok ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang secara konsisten menempatkan diri sebagai oposisi sejak reformasi. Kelompok ini sangat getol memperjuangkan keadilan dan menuntut sikap rezim yang dinilai mengkriminalisasi ulama. Namun, karena sikap ini dinilai mengganggu kekuasaan rezim, kelompok ini pun dieliminasi. Sembari diperkuat dengan stigma sebagai kelompok Islam konservatif dan anti-pluralistik, organisasi keagamaan ini pun dibubarkan.³⁶ Padahal jika ditelisik, pendirian organisasi keagamaan ini dijamin dalam hak kebebasan berkumpul dan berpendapat. Namun, karena dinilai membangkang dan mendatangkan kerugian, kelompok ini pun dibubarkan dengan taktik yang canggih dan tersembunyi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam jaringan kekuasaan Jokowi, semua elemen dipastikan harus mampu didisiplinkan. Semua itu dibuat demi menjamin efisiensi kekuasaan.³⁷ Dalam cara kerja yang tersembunyi dan sulit dideteksi (tersebut), apabila ada elemen yang berada di luar ‘lintas batas’ kekuasaan dan dinilai mendatangkan kerugian, maka ia segera dieleminasi.

Diseminasi Pengetahuan dalam Kekuasaan Jokowi

Tatkala berhasil menghimpun setiap elemen dalam satu jaringan, teknik pendisiplinan ini juga diafirmasi dengan pemantapan formasi pengetahuan.³⁸ Di sini Jokowi mendiseminasi pengetahuan. Ia menciptakan pengetahuan untuk mempengaruhi praktik hidup bermasyarakat. Hal ini bisa dilihat tatkala ia menyampaikan pidato politik saat pelantikannya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Kala itu, ia mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama. Dengan slogan

³⁴Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, *op.cit.*, hlm. 151.

³⁵*Ibid.*, hlm. 153.

³⁶ Reni Rentika Waty, Landasan Sikap Oposisi Front Pembela Islam terhadap Pemerintahan Jokowi Tahun 2014-2020, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 2:2 (Jakarta: Fisip Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 80.

³⁷Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, *op.cit.*, hlm. 152.

³⁸Josep Rouse, “Power/Knowledge”, dalam *The Cambridge Companion of Foucault*, Garry Gunting (ed.), *op.cit.*, hlm. 94.

“kerja, kerja, dan kerja”, Jokowi memproduksi pengetahuan yang meyakinkan semua pihak bahwa negara ini akan berwibawa tatkala mereka semua merujuk pada amanat konstitusi.³⁹

Selain itu, diseminasi ini berlanjut tatkala Jokowi juga memproduksi pengetahuan (wacana) tentang identitasnya sebagai politisi yang populis. Ia memang tidak lahir dari golongan para elit. Pun ia bukan bagian dari kaum militer. Ia hanyalah seorang rakyat biasa yang memberanikan diri untuk memimpin. Dengan kondisi ini ia pun menganggap dirinya sebagai representasi rakyat.

Di hati masyarakat, ia membangun kesan-kesan yang merakyat. Ia mengonstruksi pengetahuan bahwa ia adalah orang sederhana yang berpandangan progresif, bervisi kemajuan, dan sangat mementingkan kemajemukan. Dibarengi dengan gaya blusukan dan keaktifan memberi bantuan kepada rakyat kecil, ia mendiseminasi pengetahuan bahwa dirinya adalah pemimpin yang mampu memenuhi kehendak dan keinginan semua pihak.⁴⁰

Persis dalam keadaan inilah, kekuasaan Jokowi berhasil menembus tubuh subjek. Kekuasaan itu berhasil mengontrol tingkah laku.⁴¹ Ia berhasil membawa pengaruh. Dengan diseminasi pengetahuan, kekuasaan itu membawa kesadaran baru dalam diri subjek dan elemen. Ia menciptakan kesadaran baru agar tiap-tiap orang mesti tunduk dan patuh.

Rekonfigurasi Subjek dan Institusi

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana corak dan mekanisme kekuasaan Jokowi. Selanjutnya, pada bagian ini penulis akan mengemukakan efek kekuasaan Jokowi. Di sini akan dijelaskan bagaimana kekuasaan itu menghasilkan rekonfigurasi, yakni proses mengubah atau memperbaharui bentuk dan kekuatan substantif dari subjek politik (warga negara) dan pelbagai institusi penting dalam demokrasi. Dalam rekonfigurasi, pelbagai komponen yang terikat dengan Jokowi, dipretel dan dibentuk sesuai dengan standar kepentingan kekuasaan.

Kematian Subjek Politik

Individu-individu yang terseret dalam lingkaran kekuasaan sesungguhnya direkonstruksi seturut kebenaran Jokowi. Subjek yang terkondisi dalam jaringan Jokowi diformat sedemikian rupa untuk menjadi alat legitimasi kepentingan kekuasaan. Di tengah teknik pendisiplinan kekuasaan yang canggih,

³⁹Gregorius D Sarin Mau, “Relasi Kuasa Pasca Pidato Politik Presiden Joko Widodo: Studi Kritis Pada Teks Pidato Presiden Politik Jokowi Pada Saat Pelantikan Presiden 2014”, *Jurnal Media Kom* 2:9 (Jakarta:Universitas Mercu Buana, 2019), hlm. 185.

⁴⁰Made Supriatma, “Langkah Politik Jokowi: dari Populis ke Oportunis”, dalam <https://projcetmultatuli.org/langkah-politik-jokowi-dari-populis-ke-oportunis/>, diakses pada 16 Oktober 2024.

⁴¹Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016), hlm. 17.

setiap aktor mesti berpikir dan bertindak seturut rujukan kebenaran kekuasaan Jokowi. Setiap pribadi dikendali, demikian pula masing-masing individu diarahkan agar berkiblat pada kebenaran Jokowi.

Namun demikian, menurut penulis, dalam kondisi ini posisi kewarganegaraan demokratis dihempas. Subjek yang direkonstruksi dalam jaringan kekuasaan akan melucuti kualitas kewarganegaraannya. Subjek tidak lagi berwatak politik, melainkan ia hanya diarahkan untuk bertanggung jawab demi melegitimasi kepentingan Jokowi. Alih-alih bertindak sebagai warga negara berdaulat, subjek (warga negara) justru menanggalkan keutamaan diri. Ia bertindak hanya untuk melegitimasi Jokowi. Ia beroperasi hanya untuk memantapkan kepentingan kekuasaan.

Tatkala menanggalkan keutamaan sebagai warga negara, subjek itu akan cenderung mengkultuskan Jokowi. Setiap pribadi menganggap Jokowi adalah pemimpin yang benar. Ia adalah representasi rakyat. Ia adalah pemimpin yang selaras dengan kehendak komunal. Persis pengkultusan semacam ini bisa terlihat dalam diri beberapa kelompok, yakni Projo (Pro Jokowi), Alap-Alap Jokowi, dan Pasukan Bawah Tanah Jokowi (Pasbata). Tidak hanya itu, pengkultusan terhadap Jokowi bahkan juga merasuki beberapa akademisi, seperti yang dialami Koentjoro, Guru Besar UGM.⁴²

Menurut penulis, pengkultusan Jokowi memformat rasionalitas politik kritis-demokratis. Walaupun seturut riset akademik, Jokowi sudah menghancurkan demokrasi, subjek (warga negara) enggan memberontak. Tatkala terjebak dalam jaringan kekuasaan Jokowi, mereka gagap bersuara. Mereka amat sulit mengkritisi keadaan.

Tatkala kritisisme mati, subjek (warga negara) enggan memikirkan urusan bersama. Mereka menutup diri terhadap persoalan sosial. Mereka tidak lagi menaruh perhatian pada kesadaran kolektif, terkait apa yang menjadi titik simpul keinginan semua pihak.

Sebagai bagian dari kekuasaan, tugas mereka hanyalah untuk menerjemahkan apa yang menjadi kehendak Jokowi. Mereka beroperasi hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka bekerja hanya untuk memproduksi pengetahuan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang benar. Di sinilah efek kekuasaan Jokowi, tatkala ia mampu menciptakan subjek yang melegitimasi posisinya sebagai penguasa yang merakyat. Kekuasaan Jokowi tidak hanya menembus tubuh subjek, tetapi ia juga mampu merekonstruksi subjek untuk setia berkiblat pada kekuasaan. Persis subjek seperti inilah yang gemar membela dan mempertahankan kebenaran tentang Jokowi.

Pemberangusan Elemen Demokratis

Selain menyeret individu, Jokowi juga menarik institusi sebagai komponen penting kekuasaan. Dalam cengkeraman kekuasaan Jokowi, semua elemen penting dalam demokrasi dibentuk dan dipretel sedemikian rupa. Dalam teknik pendisiplinan yang canggih, mereka diatur dan ditata untuk selalu bereferensi pada kehendak Jokowi. Selain itu, elemen yang direkonstruksi seturut kebenaran Jokowi, akan

⁴² “Nestapa UGM, Dulu Puja Jokowi, Kini Kecewa karena Banyaknya Penyimpangan” dalam <https://nasional.kompas.com/nestapa-ugm-dulu-puja-jokowi-kini-kecewa-karena-banyaknya-penyimpangan>, diakses pada 16 Oktober 2024

bertindak produktif. Setiap elemen akan bekerja untuk melegitimasi kekuasaan Jokowi. Dengan kapasitas yang dimiliki, mereka beroperasi untuk mempertahankan posisi Jokowi.

Namun, menurut penulis, tatkala dinstrumentalisasi dalam jaringan kekuasaan, institusi mengalami erosi kedaulatan diri. Ia tidak lagi menjadi agen pengadaban demokrasi. Ia tidak lagi bekerja untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Alih-alih dianggap sebagai institusi penjamin hak-hak positif dan kesejahteraan masyarakat,⁴³ institusi dan pelbagai komponen penting demokrasi justru menganggangi kepentingan rakyat. Karena dihimpun dalam jaringan kekuasaan, semua elemen penting dalam demokrasi direkonstruksi demi melanggengkan tata kepentingan. Persis hal ini tercermin dalam beberapa persoalan berikut ini. *Pertama*, depolitisasi hukum. Di masa kepemimpinannya, Jokowi amat mengandalkan kekuatan hukum. Sebagaimana Ken M. P. Setiawan, kekuatan hukum dipakai Jokowi sebagai medium untuk mengamankan kekuasaan. Kekuatan hukum diinstrumentalisasi agar kekuasaan Jokowi terhindar dari kritisisme publik. Hal ini tercermin dalam pemberlakuan UU ITE. UU ini dinilai problematis, sebab itu dijadikan sebagai medium untuk menjerat kebebasan berekspresi dan mengekang masyarakat yang tidak pro-kekuasaan. Pemberlakuan UU ini menjadi tanda bagaimana Jokowi menggunakan perangkat kekuasaan hukum.⁴⁴

Namun, tatkala diformat dalam jaringan kekuasaan, depolitisasi hukum terjadi di sana. Hukum tidak lagi berwatak politik. Ia tidak lagi berkiblat pada kepentingan *demos*. Ia justru menjadi pelayan kekuasaan. Dengan kapasitas yang dimiliki, kekuasaan hukum dipakai untuk melegitimasi kebenaran tentang Jokowi.

Kedua, pemberdayaan koalisi gemuk dan kematian oposisi. Di masa pemerintahannya, Jokowi membentuk koalisi gemuk. Ia menghimpun para rival politiknya. Ia menjadikan mereka sebagai bagian dari jaringan kekuasaan. Hal ini terungkap, misalnya, tatkala Partai Gerindra tergabung dalam barisan koalisi. Walaupun di masa kontestasi, partai ini adalah lawan politik, namun ujung-ujungnya ia diberdaya oleh kekuasaan. Tatkala tergabung dalam perangkat kekuasaan, Jokowi turut menyediakan jabatan bagi anggota partai.

Jelas, pemberdayaan koalisi gemuk turut mematikan oposisi dalam demokrasi. Ia meredam perlawanan, mengeliminasi pembangkangan, dan mematikan kritisisme lawan. Alih-alih menjadi penyelamat demokrasi, pihak oposisi justru direkonstruksi untuk menjadi agen legitimasi Jokowi. Ia diformat untuk sekadar menjadi pewarta kebenaran tentang kekuasaan.

Ketiga, instrumentalisasi media. Di masa pemerintahannya, Jokowi juga menggaet posisi media. Hal ini tampak terlihat tatkala Jokowi menghimpun kekuatan Metro-TV. Cara Jokowi menggaet media besar ini sangat unik. Mula-mula, Jokowi bersikukuh dengan pemilik media, yakni Surya Paloh. Sebagaimana dikemukakan Ross Tapsell, beberapa kali Jokowi mengundang ketua umum Partai Nasdem

⁴³Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis* (Maumere: Ledalero, 2013), hlm. 85.

⁴⁴Ken M. P. Setiawan, "Dimata-matai Negara: Kebebasan Berekspreasi di Masa Pemerintahan Jokowi", dalam Thomas Power dan Eve Warburton (ed.), *Demokrasi di Indonesia: dari Stagnasi Menuju Regresi*, terj. Yusof Ishak Institute (Jakarta: KPG, 2020), hlm. 363.

ini ke Istana Presiden, hingga kabar gembira mencuat tatkala Jokowi menunjuk HM Prasetyo, anggota Partai Nasdem, untuk menduduki posisi Jaksa Agung.⁴⁵ Selepas penunjukkan ini, Metro-TV pun menyiarkan kabar puja-puji terhadap Jokowi. Media ini kerap memberitakan pidato berkala Jokowi. Selain itu, media ini pun gencar mengabarkan prestasi dan keunggulan di masa Presiden *Wong Cilik* ini.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa media direduksi sekadar kompen dalam jaringan kekuasaan Jokowi. Karena telah bersekutu dengan kekuasaan, media tersebut tidak lagi menunjukkan taring dalam demokrasi. Ia tidak lagi menjadi agen pengadaban publik. Ia tidak lagi menjadi media kritis dalam demokrasi. Walaupun pihak redaksi berharap untuk tetap setia mengabdikan pada demokrasi, karena dikontrol kekuasaan, Metro-TV pun direkonstruksi sebagai agen kekuasaan Jokowi. Persis di sinilah media hadir sebagai produk yang mendiseminasi pengetahuan tentang kebenaran penguasa.

Keempat, pemberdayaan kekuasaan militer. Di masa pemerintahannya, Jokowi juga membangun koalisi dengan kelompok militer. Pada tahun 2014, ia memang tahu bahwa kelompok militer tidak berada di sisinya. Bukti mendasar mengungkapkan bahwa kelompok ini cenderung mendukung Prabowo dengan alasan bahwa figur ini adalah personifikasi kebangkitan militer dalam politik. Namun, tatkala terpilih, Jokowi kemudian melakukan gerakan konsolidasi militer dengan memberi konsesi besar kepada mereka.⁴⁶ Dalam banyak fakta, Jokowi mengorbitkan beberapa figur TNI sebagai panglima. Ia menjanjikan jabatan. Ia melantik mereka sebagai figur penting. Dalam beberapa kejadian, kelompok militer juga diberi ruang untuk menjalankan tugas-tugas non-militer. Selain itu, gaji anggota militer pun juga dinaikan.

Namun demikian, mekanisme kekuasaan seperti ini, merupakan cara Jokowi memikat hati militer. Dengan cara kerja seperti ini, Jokowi memberdayakan militer untuk dijadikan sebagai agen legitimasi kekuasaan. Jokowi memanfaatkan kelompok ini untuk menangkis sikap kritis dan pelbagai serangan terhadap kekuasaan di ruang publik.

Karena itu di sinilah Jokowi berhasil merekonstruksi kelompok militer. Alih-alih terlibat sebagai agen penting demokrasi, kelompok ini tidak lagi berkiblat pada kepentingan rakyat. Tatkala direkonstruksi, ia sekadar hadir sebagai entitas yang menerjemahkan dan melegitimasi kehendak Jokowi.

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa di masa pemerintahannya, Jokowi berhasil mengonstruksi kekuasaan yang tangguh. Corak kekuasaan itu tidak identik dengan kekerasan. Namun, corak kekuasaan itu berhubungan dengan strategi dan upaya menata relasi demi menjamin keberlangsungan posisi. Kekuasaan itu tidak digenggam oleh ‘satu tangan’. Ia tidak hanya milik satu

⁴⁵Ross Tapsell, “Media dan Kemunduran Demokrasi” dalam Thomas Power dan Eve Warburton (ed.), *Demokrasi di Indonesia: dari Stagnasi Menuju Regresi*, *op.cit.*, hlm. 304.

⁴⁶Gina Sabrina dan Alfian Al-Ayubby, “Jokowi Membuka Pintu Barak Militer”, dalam <https://indoprogress.com/jokowi-membuka-pintu-barak-militer>, diakses pada 16 Oktober 2024.

pelaku. Ia justru hidup dalam jaringan relasi antara tiap-tiap orang atau lembaga. Mereka yang terikat dengan jaringan kekuasaan ini diberdaya sedemikian rupa. Mereka dibentuk sesuai dengan standar kebenaran Jokowi. Mereka diformat dan direkonstruksi menjadi agen legitimasi kekuasaan.

Jokowi tetap bertahan dalam demokrasi, sebab ia memiliki jaringan kekuasaan yang luas dan kuat. Walaupun dinilai telah menghancurkan demokrasi, Jokowi justru sangat sulit dilengser. Sebab, di sana publik tidak hanya berhadapan dengan Jokowi sebagai *person*. Namun, di balik itu, terdapat unsur kekuatan yang menyatu dengan utuh. Di sana tidak ada kekuatan tandingan, sebab tiap-tiap orang sudah ‘dibius’ untuk menjadi agen legitimasi kekuasaan.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, di tengah konstruksi kekuasaan Jokowi yang kuat, apakah mungkin gerakan perlawanan dapat dikonstruksi? Tentu ia! Hal ini terbukti tatkala di akhir masa kekuasaannya, lahir gerakan tandingan dari pelbagai pihak. Di tengah geliat menyiapkan jalan untuk melebarkan sayap kepentingannya dengan mengorbitkan anak kandung menjadi pemimpin, publik mengonstruksikan gerakan perlawanan yang dahsyat. Perlawanan itu lahir dari kesadaran bahwa di balik keramahan, Jokowi sesungguhnya sedang memantapkan kepentingan keluarga. Walaupun terkesan lambat, perlawanan seperti ini menjadi tanda bahwa di balik konstruksi kekuasaan yang kuat, masih ada kemungkinan untuk mengonstruksikan gerakan tandingan. Walaupun kekuasaan Jokowi tangguh, masih ada ruang untuk mengaktifkan gerakan perlawanan warga negara.

Namun, apakah cukup hanya sebatas itu? Tentu tidak. Agar menjadi sebuah kekuatan yang utuh, gerakan kewarganegaraan aktif yang ditunjukkan di akhir masa pemerintahan Jokowi, mesti menerapkan mekanisme yang canggih. Gerakan semacam ini akan menjadi kekuatan tandingan yang kokoh dalam demokrasi tatkala ia mampu menjaring komponen yang banyak. Gerakan ini juga mesti mampu mendiseminasi pengetahuan, demi menjamin lahirnya kesadaran warga negara tentang arti penting merawat dan menjaga demokrasi.

Daftar Rujukan

- Farchan, Yusa. “Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru”, *Jurnal Adhikari*, Vol. 03, No. 01. Bogor: 2022.
- Foucault, Michael. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Terj. Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality: Volume I An Introduction*. Terj. Robert Hurley. New York: Pantheon, Books, 1978.
- Foucault, Michael “Power, Right, Truth”, dalam *Contemporer Political Philosoph*. Robert E. Goddin dan Philip Pettit (ed). Victoria: Blackwell Publishing Ltd, 1997.

- Haryatmoko. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016.
- Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. United States: Crown, 2018.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Ledalaero, 2013.
- Mau, Gregorius D Sarin. “Relasi Kuasa Pasca Pidato Politik Presiden Joko Widodo: Studi Kritis Pada Teks Pidato Presiden Politik Jokowi pada Saat Pelantikan Presiden 2014”. *Jurnal Media Kom*, Vol. 2, No. 9, Jakarta: 2019.
- Mitzler, Markus. *Reinventing Asia Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. Hawai’i: East-West Center, 2015.
- “Nestapa UGM, Dulu Puja Jokowi, Kini Kecewa karena Banyaknya Penyimpangan” dalam <https://nasional.kompas.com/nestapa-ugm-dulu-puja-jokowi-kini-kecewa-karena-banyaknya-penyimpangan>, diakses pada 16 Oktober 2024.
- Power, Thomas P. “Jokowi’s Authoritarian and Indonesia’s Democratic Decline”. *Bulletin of Indonesian of Economic Studies*, Vol. 54, No.3, New York: 2018.
- Power, Thomas Power dan Eve Warburton, ed. *Demokrasi di Indonesia: dari Stagnasi Menuju Regresi*. Terj. Yusof Ishak Institute. Jakarta: KPG, 2020.
- Pryatno, Ican. “Titik Nadir Demokrasi”, *Pos Kupang*, edisi 24 Agustus 2024.
- Rouse, Josep. “Power/Knowledge”, dalam *The Cambridge Companion of Foucault*, Garry Gunting (ed.). Cambridge: The Press Syndicate of The University of Cambridge, 1994.
- “Rusak Demokrasi Karena Ulah Pendengung”, dalam <https://majalah.tempo.com/amp/opini/164521/bagaimana-buzzer-pemerintah-berkomplot-menghancurkan-demokrasi>, diakses pada 16 Oktober 2024.
- Rusdin, Rusmawaty, Bte. “Komunikasi Politik Jokowi Melalui Diplomasi di Meja Makan”. *Jurnal Kinesik*. Vol. 2, No. 7, Palu: 2020.
- Russell, Betrand. *Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial dan Politik*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 1988.
- Sabrina, Gina dan Alfian Al-Ayubby. “Jokowi Membuka Pintu Barak Militer”, dalam <https://indoprogress.com/jokowi-membuka-pintu-barak-militer>, diakses pada 16 Oktober 2024.
- Setiawan, Ken M. P. “Dimata-matai Negara: Kebebasan Berekspresi di Masa Pemerintahan Jokowi”, dalam Thomas Power dan Eve Warburton (ed.). *Demokrasi di Indonesia: dari Stagnasi Menuju Regresi*. Terj. Yusof Ishak Institute. Jakarta: KPG, 2020.
- Sianipar, Imelda Masni Juniaty. “Strategi Pemimpin Populis Baru Indonesia Mencapai Kekuasaan”. *Jurnal Sociae Polites*, Vol.16, No. 1. Jakarta: 2015.
- Supriatma, Made. “Langkah Politik Jokowi: dari Populis ke Oportunis”, dalam <https://projecetmultatuli.org/langkah-politik-jokowi-dari-populis-ke-oportunis/>, diakses pada 16 Oktober 2024.
- Tapsell, Ross. “Media dan Kemunduran Demokrasi”, dalam Thomas Power dan Eve Warburton (ed.). *Demokrasi di Indonesia: dari Stagnasi Menuju Regresi*. Terj. Yusof Ishak Institute. Jakarta: KPG, 2020.
- Waty, Reni Rentika. “Landasan Sikap Oposisi Front Pembela Islam terhadap Pemerintahan Jokowi Tahun 2014-2020”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 2, Jakarta:2021.
- Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, dan Herlambang P Wiratraman (ed.). *Demokrasi Tanpa Demos*. Depok: LP3ES, 2021.